



MAGISTER  
AKUNTANSI



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
WILAYAH D.I. YOGYAKARTA

# SERTIFIKAT

diberikan kepada:

*Wahyudin Nor*

sebagai

*Pemakalah*

Pada Acara

5th National Conference on Accounting & Finance (NCAF)

dengan Tema:

**“STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL”**

diselenggarakan pada tanggal 29-30 September 2021



Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, SE.,M.Si., Ph.D



Ketua Ikatan Akuntan Indonesia  
Wilayah D I Yogyakarta

Dr. Hardo Basuki, M.Soc.Sc., CSA., Ak., CA

CO-HOST:



# **INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS OF CRYPTOCURRENCY**

Rahmi Nadiar<sup>1</sup>, Wahyudin Nor<sup>2</sup>, Lili Safrida<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Borneo Lestari, Kalimantan Selatan

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan

## **Abstraksi:**

**Tujuan Penelitian:** Studi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tantangan akuntansi untuk *cryptocurrency* dalam kerangka akuntansi saat ini di Indonesia, serta mengidentifikasi model yang relevan untuk akuntansi *cryptocurrency*.

**Desain/Methodologi/Pendekatan:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan informan, dan dokumen/arsip. Teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen/arsip. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

**Hasil Penelitian:** Temuan penelitian menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan dalam PSAK untuk akuntansi *cryptocurrency* yang ada saat ini. Hal ini berdasarkan perbedaan dalam penggunaan model bisnis suatu entitas. Perbedaan dalam aktivitas perusahaan dan substansi ekonomi, menyebabkan penggunaan yang berbeda dalam akuntansi *cryptocurrency*.

**Kontribusi Teori/Originalitas:** Berkontribusi dalam pengembangan standar akuntansi di Indonesia. Popularitas *cryptocurrency* yang semakin meningkat, secara tidak langsung mendesak regulator untuk membuat pedoman penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Keterbatasan Penelitian:** Hasil penelitian bergantung pada pengalaman dan pemahaman penulis, keterbatasan waktu dalam melakukan wawancara dengan informan, serta cakupan topik dapat diperluas dengan menambah perspektif lain.

**Kata Kunci:** Akuntansi, *Cryptocurrency*, *Blockchain*, PSAK, Aset Tak Berwujud.

## **Pendahuluan**

Konsep *cryptocurrency* mulai diketahui publik sejak tahun 2009, ketika *cryptocurrency* pertama hadir, yaitu Bitcoin. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dapat digunakan sebagai alat tukar dan menggunakan sistem yang dinamakan kriptografi (Yahya, 2016). Bitcoin dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 yang diumumkan dengan cara menyebarkan *whitepaper* yang dikirimkan melalui *mailing list* tentang ide dan teknologi di balik Bitcoin yang diciptakannya (Marr, 2017). Pada awalnya, mata uang digital ini dibuat sebagai tanggapan dalam menghadapi krisis keuangan, dan menurut Nakamoto, apa yang dibutuhkan saat itu adalah sistem pembayaran elektronik yang didasarkan pada bukti kriptografi yang terpercaya. Hal ini merupakan jaringan elektronik *peer-to-peer* yang memungkinkan individu untuk melakukan transaksi anonim tanpa perlu perantara keuangan atau pihak ketiga (Nakamoto, 2008).

Karakteristik inovatif dan harga fluktuatif yang dimiliki oleh *cryptocurrency* menghasilkan banyak perhatian badan-badan yang membuat peraturan. Legal status *cryptocurrency* saat ini bervariasi dari satu negara ke negara lain, dapat berubah karena

pemerintah dan bank sentral sebagai patokan dan tim penilainya. Sehingga kedua institusi tersebut terus-menerus mempelajari serta merevisi pandangan serta pendapatnya terhadap *cryptocurrency*. Jepang yang memiliki salah satu pasar terbesar untuk Bitcoin, telah menerima *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah. Di negara lain, *cryptocurrency* diterima tetapi tidak dipandang sebagai alat pembayaran yang sah, contohnya adalah United Kingdom, Korea Selatan dan Singapura (Rooney, 2018).

Transaksi dilakukan berdasarkan *supply* dan *demand* dari seluruh pengguna *cryptocurrency* (Zubir et al., 2020). Sehingga, hukum jual-beli diterapkan dengan harga akan meningkat jika banyak orang yang ingin membeli, sebaliknya harga akan menurun jika penawaran dipasar *cryptocurrency* melemah.

Kurangnya peraturan dan anonimitas yang terkait dengan *cryptocurrency* mengakibatkan beberapa pandangan, salah satunya yaitu memfasilitasi pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya (Sianipar, 2017). Kurangnya peraturan juga menyangkut bidang ilmu akuntansi dan profesi audit, karena tidak ada *International Financial Reporting Standards (IFRS)* dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (khusus di Indonesia) yang mengatur akuntansi untuk *cryptocurrency* sehingga dapat menghasilkan berbagai kekeliruan praktik akuntansi yang digunakan dalam pencatatan transaksi *cryptocurrency* (AASB, 2018).

Otoritas akuntansi di seluruh dunia telah menyatakan perlunya pedoman untuk menghindari tambal sulam aturan yang tidak konsisten. Maka perlu dibuat standar yang kiranya dapat digunakan dan dipatuhi secara global. AASB atau *Australian Accounting Standards Board* juga menyoroti pentingnya penerbitan suatu standar untuk menghindari adanya keragaman perlakuan akuntansi yang digunakan (AASB, 2018). Berdasarkan isu dan regulasi yang ada di Indonesia, maka bagaimana klasifikasi akun dalam akuntansi yang relevan terkait *cryptocurrency* sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia?

## **Tinjauan Pustaka**

### ***Blockchain***

*Blockchain* adalah sebuah kumpulan *block* yang saling berhubungan dan menyimpan data atas transaksi yang dilakukan dan tidak bisa diedit maupun dihapus (Crosby et al., 2016). *Scope blockchain* lebih luas daripada *cryptocurrency*, saling terhubung tetapi berbeda. Teknologi *blockchain* muncul sebagai pelaku dibalik layar yang meliputi *mining*, *hashing*, dan *general ledgers* (Yulianton et al., 2018).

*Blockchain* adalah buku besar terdistribusi yang menyimpan catatan transaksi di seluruh jaringan yang mendesentralisasikan pelacakan dan validasinya (KPMG, 2018a). Karena transaksi ini terdesentralisasi, tidak ada satu pihak pun yang mengontrol dan mengubah datanya. *Blockchain* sudah ada sejak tahun 1979, dan hal ini merevolusi dunia kriptografi sejak munculnya Bitcoin pertama kalinya. Secara sederhana, *blockchain* adalah metode penataan data yang memungkinkan verifikasi dengan cepat dan efisien dengan keakuratan informasi (Deloitte, 2017).

Pertumbuhan pesat teknologi *blockchain* telah memberikan banyak tantangan bagi perusahaan besar, dimulai dari memahami cara terbaik dalam menerapkan, menggunakan, dan memanfaatkan nilai *blockchain*, sambil mengelola risikonya. Penilaian risiko teknologi *blockchain* dibuat untuk memungkinkan perusahaan menilai kapabilitasnya (Deloitte, 2017). Adanya tantangan ini membuat perusahaan mengoptimalkan potensi teknologi dan secara tidak langsung dapat memitigasi risiko negatif kemunculan teknologi tersebut. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan efisiensi dan mencapai nilai maksimal dari *blockchain* itu sendiri.

### **Cryptocurrency**

Teknologi merupakan salah satu inovasi yang penting dalam industri keuangan. Salah satu inovasi yang paling diperdebatkan adalah *cryptocurrency* yang menggunakan teknologi *blockchain* untuk membuat pembayaran elektronik langsung antara dua orang (Syamsiah, 2017). Transaksi ini dieksekusi tanpa melalui pihak ketiga seperti bank (Nakamoto, 2008). Nilai dari *cryptocurrency* sendiri tidak dapat ditentukan oleh aset berwujud yang dapat dikonversi seperti emas atau mata uang fiat seperti dolar. *Cryptocurrency* ditentukan oleh interaksi dari penawaran dan permintaan yang dilakukan oleh seluruh pengguna.

*Cryptocurrency* dianggap bisa memudahkan transaksi bisnis dari orang ke orang di seluruh dunia tanpa perantara. Hal ini tidak hanya dapat mengurangi hambatan perdagangan tetapi juga mengurangi biaya administrasi pertukaran mata uang, serta dapat meningkatkan produktivitas (Raiborn & Sivitanides, 2015). Meskipun demikian, kegunaan *cryptocurrency* tetap dianggap tidak aman karena harga yang fluktuatif dan kurangnya keamanan hukum. Kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi menimbulkan risiko adanya pencucian uang dengan menggunakan platform perdagangan *cryptocurrency*.

Tabel 1. Kelebihan dan Kelemahan *Cryptocurrency*

Keuntungan	Kelemahan
Dapat ditambang kapan saja	Volatilitas sangat tinggi
Tidak ada inflasi	Risiko tinggi
Transaksi tidak terbatas	Investasi jangka menengah dan jangka panjang
Tidak dapat dipalsukan dan digandakan	
Anonim dan transparan	

Sumber: diolah penulis (2021)

### **Fundamental Cryptocurrency**

Perdagangan aset volatil seperti *cryptocurrency* membutuhkan keahlian tertentu. Memilih rencana, mengerti dunia perdagangan yang luas dan menguasai analisis teknis serta fundamentalnya. *Cryptocurrency* tidak memiliki fundamental seperti emas dan mata uang fiat. Dalam hal analisis teknis, teori pasar keuangan yang ada saat ini dapat menjadi landasan. Banyak *trader cryptocurrency* menggunakan parameter teknis yang sama seperti perdagangan valas, saham, dan komoditas. Alat analisis seperti *Relative Strength Index (RSI)*, *Moving Average Covergence Divergence (MACD)*, dan *Bollinger Bands* dinilai dapat memprediksi perilaku pasar (Global Legal Research Center, 2018). Demikian, sarana analisis teknis ini sangat disukai di dunia *cryptocurrency*.

Dalam analisis fundamental *cryptocurrency*, walaupun pendekatannya serupa, tetapi alat analisis ini tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi *cryptocurrency*. Analisis fundamental adalah metode yang digunakan investor untuk menentukan nilai intrinsik suatu bisnis. Tujuannya yaitu untuk memastikan apakah suatu aset atau bisnis dinilai terlampau tinggi atau rendah dengan melihat faktor internal dan eksternal. Demikian jaringan *cryptocurrency* tidak dapat dinilai melalui lensa yang sama dengan bisnis tradisional. Sehingga, terdapat 3 (tiga) parameter yang dapat digunakan dalam menilai *cryptocurrency*, yaitu *on-chain metrics*, *project metrics* dan *financial metrics* (CoinDesk, 2019).

Tabel 2. Analisis Fundamental *Cryptocurrency*

<p><i>On-Chain Metrics</i>: Metrik yang dapat diamati dengan melihat data yang disediakan oleh <i>blockchain</i></p>	<p><i>Transaction Count</i></p>	<p>Mengukur seluruh transaksi yang telah terjadi didalam <i>blockchain</i>, dengan memplot angka untuk periode yang ditetapkan, sehingga dapat melihat transaksi yang berubah dari waktu ke waktu.</p>
	<p><i>Transaction Value</i></p>	<p>Mengukur berapa nilai yang diperdagangkan dalam satu periode.</p>
	<p><i>Active Addresses</i></p>	<p>Mengukur alamat <i>blockchain</i> yang aktif dalam rentang waktu tertentu, seperti menghitung pengirim dan penerima setiap transaksi dalam satu periode tertentu.</p>
	<p><i>Fees Paid</i></p>	<p>Mengukur biaya yang dibayarkan dalam periode tertentu, karena biaya <i>mining</i> cenderung meningkat dari waktu ke waktu.</p>
	<p><i>Hash Rate</i></p>	<p>Mengukur kemandirian jaringan, semakin tinggi <i>hash rate</i>, maka akan semakin sulit untuk diretas.</p>
	<p><i>Amount Staked</i></p>	<p>Memvalidasi transaksi sesuai dengan jumlah koin yang dimiliki oleh pengguna.</p>
<p><i>Project Metrics</i>: Melibatkan pendekatan kualitatif yang memperhatikan faktor-faktor seperti kinerja tim, <i>whitepaper</i>, dan <i>road map</i> yang akan datang.</p>	<p><i>The Whitepaper</i></p>	<p>Dokumen teknis yang memberi gambaran umum berkenaan dengan <i>cryptocurrency</i>, seperti deskripsi market, distribusi token, tujuan, hingga rencana beberapa tahun kedepan.</p>
	<p><i>The Team</i></p>	<p>Rekam jejak anggota tim, mengenai keahlian dalam pencapaian proyek.</p>
	<p><i>Competitors</i></p>	<p>Melihat kekurangan dan kelebihan kompetitor, sehingga dapat menjadi benchmark dalam pembuatan proyek.</p>

	<i>Tokenomics and Initial Distribution</i>	Kualitas token yang meyakinkan investor untuk mengadopsi dan membantu dalam membangun ekosistem proyek, serta karakteristik <i>supply</i> dan <i>demand</i> .
<i>Financial Metrics</i> : Informasi tentang bagaimana <i>cryptocurrency</i> diperdagangkan, apa yang diperdagangkan, likuiditas, dll.	<i>Market Capitalization</i>	Mengalikan penawaran yang beredar dengan harga saat ini.
	<i>Liquidity and Volume</i>	Berapa banyak nilai yang telah diperdagangkan dengan melihat volume perdagangan dalam periode waktu tertentu, sebagai indikator minat pasar terhadap investasi prospektif.
	<i>Supply Mechanisms</i>	<i>Supply</i> maksimum, <i>supply</i> yang beredar dan tingkat inflasi dapat membantu dalam membuat keputusan investasi.

Sumber: di olah penulis berdasarkan CoinDesk Report (2021)

Berdasarkan 3 (tiga) parameter tersebut, maka investor dapat menentukan jenis *cryptocurrency* mana yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya. Investor dapat menggabungkan pendekatan-pendekatan tersebut sebagai indikator dalam membuat keputusan investasi.

### **Akuntansi dan *Cryptocurrency***

Berurusan dengan *cryptocurrency* menimbulkan banyak masalah akuntansi, alasannya karena hal ini disebabkan oleh sifat dan karakteristik khusus dari mata uang tersebut dan keragaman tujuan perolehannya, serta belum adanya standar akuntansi yang menentukan perlakuan akuntansi mata uang kripto (KPMG, 2018b).

Meskipun tidak ada standar atau pedoman yang dikeluarkan oleh Internasional Standar Pelaporan Keuangan (IFRS) maupun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia untuk akuntansi *cryptocurrency*, tetapi PSAK 1 dan PSAK 25 mengenai perlakuan transaksi akuntansi, namun untuk transaksi *cryptocurrency* tidak disebutkan dalam pedoman tersebut. PSAK 25 menyatakan bahwa dengan tidak adanya standar pelaporan *cryptocurrency*, sehingga harus menggunakan penilaian pribadi untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi untuk suatu transaksi, peristiwa, atau hal lainnya. Seperti terkait dengan kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna dan handal. Demikian, dalam arti laporan keuangan, yaitu posisi keuangan yang benar-benar disajikan secara transparan dan bebas dari bias (IAI, 2019).

Entitas harus mempertimbangkan beberapa hal dalam melakukan pencatatan transaksi *cryptocurrency*, yaitu:

- a. Persyaratan SAK yang menangani masalah serupa dan terkait
- b. Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam Konseptual Kerangka Pelaporan Keuangan (IAI, 2019).

Mengingat PSAK 1 dan PSAK 25, penelitian ini menemukan bahwa entitas menerapkan hal yang sama terhadap perlakuan akuntansi yang terkandung dalam standar ketika berhadapan dengan transaksi *cryptocurrency*. Ini membuat entitas bingung apa itu perlakuan akuntansi yang andal untuk *cryptocurrency*? Bisakah kita mendefinisikan mata uang ini sebagai aset?

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini mengandalkan perolehan data primer dari hasil wawancara dengan berbagai informan. Informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang yang erat kaitannya dengan akuntansi dan *cryptocurrency*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) dan Auditor memiliki andil dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memberikan dan mengidentifikasi pandangan mengenai relevansi transaksi *cryptocurrency* dalam kerangka akuntansi saat ini. Melihat apa dan bagaimana model perusahaan, perbedaan dalam aktivitas perusahaan dan substansi ekonomi dari transaksi yang mengarah pada penggunaan yang berbeda, dapat mempengaruhi relevansi standar akuntansi dan *cryptocurrency*.

### **Hasil Penelitian dan Diskusi**

#### **Metode Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan**

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan merupakan hal penting sebagai alat pertimbangan dalam pencatatan laporan keuangan. Perlu dilakukan identifikasi dan asumsi terhadap hal yang mendasari dalam pencatatan sebuah transaksi tertentu. Seperti kapan aset harus dicatat, berapa jumlahnya dan informasi lainnya yang perlu dilaporkan dalam laporan keuangan (IAI, 2019).

Pengakuan mengacu pada proses memasukkan informasi ke dalam laporan keuangan. Pengukuran merupakan proses penilaian suatu transaksi dengan jumlah numerik yang dijelaskan dengan angka yang tepat. Penyajian adalah pemilihan klasifikasi akun dalam laporan keuangan. Pengungkapan mengacu pada proses memasukkan informasi tambahan dalam laporan keuangan, disebutkan dalam laporan keuangan dan dijelaskan secara rinci dalam lampiran laporan keuangan (IAI, 2019).

Kriteria pengakuan tidak dibahas secara luas dalam literatur karena diharapkan standar yang ada digunakan untuk menerapkan kriteria pengakuan ke beberapa situasi yang berbeda (IFRIC, 2019). *Cryptocurrency* adalah aset, tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut tentang bagaimana *cryptocurrency* memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset (Deloitte, 2017; EY, 2018). Dalam kriteria pengakuan, terdapat kemungkinan bahwa setiap manfaat ekonomi masa depan memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal (IASB, 2018). Masalah terkait volatilitas *cryptocurrency* bisa menjadi tantangan yang menyebabkan masalah dengan keandalan.

Metode pengukuran tergantung pada standar mana yang diterapkan pada *cryptocurrency*. Berdasarkan pernyataan Auditor Eksternal dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, melihat nilai pasar menjadi cara dalam menilai *cryptocurrency*. Nilai pasar harus

didasarkan pada harga rata-rata dari platform pertukaran mata uang kripto terbesar, atau pada harga yang ditemukan terendah dari platform tertentu. Penilaian menggunakan harga yang diambil pada saat *cryptocurrency* dibeli harus digunakan sebagai pengukuran awal. Penilaian untuk *cryptocurrency* token dapat menggunakan harga pasar (AE01, 2021; AE02, 2021; DS01, 2020).

Namun beberapa informan lain memiliki pandangan berbeda, metode pengukuran tergantung pada klasifikasi aset yang ditentukan, harus diukur pada biaya perolehan atau pada nilai wajar. Jika *cryptocurrency* diperdagangkan di pasar dan tujuan memilikinya adalah untuk trading, maka dinilai dengan nilai wajar. Dalam hal ini, PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar akan digunakan.

Penyajian mensyaratkan pemberian informasi yang jujur atas pengaruh setiap transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan akun dalam akuntansi. Penyajian dalam laporan keuangan harus terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Demikian, pengungkapan mengacu pada informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keputusan investor dalam catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa klasifikasi terkait *cryptocurrency* berdasarkan pengembangan dari PSAK.

#### **PSAK 19 – Aset Tak Berwujud**

*Cryptocurrency* memenuhi kriteria sebagai aset tak berwujud sesuai dengan PSAK 19. Karena dapat diidentifikasi walaupun tidak memiliki bentuk fisik, memiliki nilai ekonomi masa depan, namun umur manfaatnya sulit diidentifikasi. Hal ini menyebabkan biaya perolehan atas aset kripto dapat diukur secara andal sesuai dengan pengakuan aset tak berwujud. Pengukuran biaya perolehan *cryptocurrency* tergantung dari kondisi pada saat diakuisisi. Setelah pengakuan awal, entitas harus memilih salah satu dari 2 (dua) dasar pengukuran, yaitu model biaya perolehan dan model biaya revaluasi. Penyajian *cryptocurrency* dicatat dalam neraca pada kolom aktiva sesuai dengan nilai bersih dikurangi akumulasi amortisasi. Dilihat dari sisi pengungkapan, maka entitas harus mengungkapkan umur manfaat *cryptocurrency* dan nilai tercatat serta periode amortisasi yang tersisa.

#### **PSAK 14 – Persediaan**

*Cryptocurrency* dalam banyak kasus harus diklasifikasikan sebagai persediaan/inventaris. Namun, *cryptocurrency* hanya dapat diklasifikasikan sebagai inventaris jika disimpan untuk dijual dalam kegiatan bisnis (IFRIC, 2019). Suatu entitas perlu menunjukkan model bisnisnya yang koheren dengan memegang mata uang kripto untuk dijual dalam kegiatan bisnis agar dapat diklasifikasikan sebagai inventaris (Deloitte, 2017). Selain itu, PSAK 14 memiliki pengecualian ruang lingkup yang mengatur akuntansi untuk persediaan dalam kasus entitas yang menjadi pedagang pialang komoditas (Deloitte, 2017). Pedagang pialang komoditas memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga akibat membeli atau menjual komoditas. Sesuai dengan panduan yang diberikan dalam literatur, ruang lingkup ini dapat diterapkan pada *cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* memenuhi definisi persediaan ketika dilakukan transaksi jual-beli sesuai dengan PSAK 14. Dalam kasus pedagang pialang komoditas, aset tersebut diukur pada



nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Namun, karena sifat kompleks dari aset *cryptocurrency*, hal itu dapat mengakibatkan tantangan dan kesulitan yang lebih besar, sehingga yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran selanjutnya. Dalam pengukuran selanjutnya, pengukuran persediaan *cryptocurrency* berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Dalam penyajiannya, entitas menyatakan sebuah penilaian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam perdagangan *cryptocurrency*. Hal ini berarti perubahan nilai wajar disajikan dalam Laporan Laba Rugi. Total jumlah persediaan dan jumlah nilai menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas perlu diungkapkan dalam pencatatan mengenai persediaan *cryptocurrency*.

#### **PSAK 58 – Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan**

*Cryptocurrency* yang selalu berada dalam keadaan dapat/tersedia untuk dijual dan penjualannya sangat mungkin terjadi (*highly probable*) sesuai dengan kriteria PSAK 58. Entitas mengukur *cryptocurrency* dimiliki untuk dijual pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Pada saat terjual, selisih antara nilai tercatat kini dengan perolehan diakui sebagai keuntungan/kerugian pelepasan aset. Kemudian penyajiannya, disajikan terpisah sebagai kelompok aset dimiliki untuk dijual pada Neraca dan keuntungan/kerugian pelepasan aset disajikan dalam Laporan Laba Rugi. Dari sisi pengungkapan, maka perlu ada pencatatan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan, jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan.

#### **PSAK 72 – Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan**

Melihat *cryptocurrency* dari sisi pendapatan, maka hal ini tidak terlepas dari pengakuannya dalam pengalihan aset kripto kepada pelanggan, serta dengan adanya smart contract, maka terdapat keterikatan dan perjanjian antara penjual dan pembeli. *Cryptocurrency* diakui pada saat entitas telah menyelesaikan transaksi. Penentuan harga transaksi sebagai jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran aset kripto dengan pengguna. Kemudian, ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan transaksi, entitas menyajikan kontrak dalam neraca sebagai aset, sesuai dengan hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pengguna. Menentukan waktu penyelesaian kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan serta aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **PSAK 10 – Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing**

Transaksi *cryptocurrency* tidak bisa terlepas dari pertukaran mata uang asing. Karena setiap transaksi yang memperoleh atau melepas *cryptocurrency*, mengadakan atau menyelesaikan kewajiban yang didenominasikan dalam suatu mata uang asing memenuhi kriteria PSAK 10. Pengukuran *cryptocurrency* dengan kurs spot pada tanggal transaksi dilakukan. Selisih kurs yang timbul pada pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya, diakui dalam Laporan Laba Rugi. Hal ini diungkapkan

berdasarkan selisih kurs neto diakui dalam pendapatan komprehensif, maka fakta tersebut dinyatakan bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional beserta alasan untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda.

### ***Cryptocurrency* dalam Pelaporan Keuangan**

*Cryptocurrency* digunakan dengan berbagai macam tujuan. Jika *cryptocurrency* digunakan sebagai alat pembayaran maka pengakuan berdasarkan aset kripto tersedia untuk dijual. Ketika terdapat keuntungan dalam penjualan *cryptocurrency*, maka dapat diakui dalam pendapatan, namun jika terdapat kerugian dalam penjualan *cryptocurrency*, maka dicatat dalam penurunan nilai. Sehingga, berdasarkan karakteristiknya, *cryptocurrency* berkaitan dengan aset dan pendapatan.

*Cryptocurrency* tidak diakui sebagai liabilitas karena tidak memenuhi kriteria liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban yang memiliki nilai ekonomi masa depan berdasarkan transaksi masa lalu yang mana entitas memiliki tanggung jawab dalam melunasinya. Pembelian aset *cryptocurrency* harus dilakukan dengan cara tunai karena pembayaran dilaksanakan langsung dengan melakukan deposit pada akun pengguna.

Tidak ada cara mutlak untuk menghitung *cryptocurrency* dan ada banyak faktor yang mempengaruhi klasifikasi aset. Misalnya berkaitan dengan tujuan memegang mata uang kripto yang dapat mempengaruhi klasifikasi aset. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama memegang aset kripto perlu dipertimbangkan ketika memutuskan klasifikasi aset (EY, 2018). Lebih lanjut, terdapat penekanan mengenai pentingnya memahami *cryptocurrency* dalam semua jenis perlakuan akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan klasifikasi aset dan diperlukan pemahaman yang mendalam. Terdapat beberapa cara dalam *disclosure* atau pengungkapan.

Pertama, bagaimana perusahaan telah memutuskan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk *cryptocurrency* yang harus diungkapkan pada tanggal neraca. Kedua, PSAK 1 dan PSAK 25 harus diterapkan untuk menjelaskan apa yang disyaratkan dalam standar pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami transaksi, aset, kewajiban, kinerja perusahaan serta stabilitas keuangan perusahaan termasuk posisi perusahaan. Sehingga dapat dipastikan bahwa pembaca laporan keuangan akan memahami transaksi yang ada dalam laporan keuangan (DS01, 2020).

Stakeholder perlu memahami bagaimana *cryptocurrency* diukur, dan apa risiko dalam penilaian itu. Perlu mengetahui perubahan negatif dan positif dalam nilai mata uang kripto. Sehingga dapat lebih memahami bagaimana *cryptocurrency* dinilai, seberapa berisiko dan volatile nilai dari *cryptocurrency*.

PSAK tidak menyediakan persyaratan pengungkapan apa pun yang dirancang khusus untuk *cryptocurrency*. Jika terdapat mata uang kripto di neraca entitas, persyaratan pengungkapan harus digunakan seperti aset lain dalam kategori yang sama. Ini berarti bahwa entitas harus mengikuti persyaratan pengungkapan yang berlaku sesuai dengan PSAK (DS01, 2020).

Selanjutnya, dinyatakan dalam PSAK 1 bahwa entitas tidak perlu memberikan pengungkapan jika informasinya tidak material. Misalnya, jika suatu aset diklasifikasikan

sebagai aset tidak berwujud, persyaratan pengungkapan PSAK 19 tidak perlu diikuti jika kepemilikan *cryptocurrency* tidak cukup material. Berdasarkan panduan IFRIC, maka PSAK 1 dapat diterapkan, di mana penilaian yang dibuat oleh manajemen mengenai kepemilikan mata uang kripto harus diungkapkan jika penilaian tersebut signifikan terhadap jumlah dalam laporan keuangan (IFRIC, 2019). Namun, penilaian ini memberikan ruang untuk kemungkinan manajemen laba dalam konteks memanipulasi pendapatan. Dengan demikian, materialitas menyisakan ruang untuk penilaian profesional dalam suatu entitas. Jika informasi tentang *cryptocurrency* tidak diungkapkan, sulit untuk mengevaluasi jenis perlakuan akuntansi apa yang telah digunakan untuk *cryptocurrency* dan manajemen laba dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Untuk dapat menilai kinerja keuangan suatu entitas, pemangku kepentingan mengakses informasi sebanyak mungkin untuk dapat menentukan keadaan suatu entitas, apakah ada yang bertentangan atau tidak dan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan asimetri informasi. Namun demikian, menjadi transparan dan mengungkapkan informasi sebanyak mungkin juga dapat menjadi keuntungan bagi entitas karena pemangku kepentingan dapat memperoleh kepercayaan lebih sehingga entitas dapat lebih mudah menarik investor. Dikatakan bahwa dengan meningkatkan jumlah informasi yang diungkapkan, pengurangan asimetri informasi antara manajemen dapat dicapai (Fadjrih Asyik, 2016). Sisi lain, peningkatan jumlah pengungkapan dapat meningkatkan kepercayaan pada suatu entitas sehingga dapat lebih mudah menarik modal dari investor, namun transparansi laporan keuangan dapat mempersulit entitas untuk meningkatkan modal karena adanya skeptisisme dari investor. Hal ini dapat berubah di masa depan ketika *cryptocurrency* mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari pengguna dan regulator.

### **Kesimpulan**

Tidak ada kesepakatan tentang model akuntansi khusus untuk akuntansi untuk *cryptocurrency*, terdapat pendapat yang berbeda peneliti tentang klasifikasi mata uang tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam PSAK untuk akuntansi *cryptocurrency*. Hasilnya juga menyimpulkan bahwa dengan menggunakan model bisnis perusahaan, perbedaan dalam kegiatan perusahaan dan substansi ekonomi, mengarah ke penggunaan yang berbeda untuk bentuk perlakuan akuntansi *cryptocurrency*.

Penelitian ini bertujuan untuk menyarankan, membandingkan, dan menilai standar akuntansi yang berpotensi dalam PSAK. Berdasarkan dari tinjauan literatur dan harga volatilitas *cryptocurrency*, penelitian menunjukkan bahwa nilai wajar akuntansi adalah sumber yang paling relevan untuk pelaporan dalam laporan keuangan ketika *cryptocurrency* diperoleh untuk tujuan investasi.

Sehingga, perlunya Standar Pelaporan Keuangan di Indonesia untuk mengeluarkan standar akuntansi atau pedoman yang mengakomodasi perlakuan akuntansi dari berbagai isu terkait dengan *cryptocurrency*. Perlunya dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang sah oleh pemerintah terkait penggunaan *cryptocurrency* yang semakin marak di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- AASB. (2018). *Digital currency – A case for standard setting activity . A perspective by the Australian Accounting Standards Board* (Issue December).  
[https://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AASB\\_ASAF\\_DigitalCurrency.pdf](https://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AASB_ASAF_DigitalCurrency.pdf)
- AE01. (2021). *Akuntansi untuk Cryptocurrency*. R. Nadiar, Pewawancara
- AE02. (2021). *Akuntansi untuk Cryptocurrency*. R. Nadiar, Pewawancara
- AE03. (2021). *Akuntansi untuk Cryptocurrency*. R. Nadiar, Pewawancara
- CoinDesk. (2019). *Crypto 's New Fundamentals* (Issue August).  
<https://static.coindesk.com/wp-content/uploads/2020/01/Crypto-Valuation-CoinDesk.pdf>
- Crosby, M., Pattanayak, P., Verma, S., & Kalyanaraman, V. (2016). BlockChain Technology: Beyond Bitcoin. *Applied Innovation Review*, 2.  
<http://scet.berkeley.edu/wp-content/uploads/AIR-2016-Blockchain.pdf>
- Deloitte. (2017). Blockchain technology and its potential impact on the audit and assurance profession. *CPA Canada, AICPA*, 1–28.  
<https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/downloadabledocuments/blockchain-technology-and-its-potential-impact-on-the-audit-and-assurance-profession.pdf>
- DS01. (2020). *Akuntansi untuk Cryptocurrency*. R. Nadiar, Pewawancara
- EY, G. I. (2018). *IFRS (#) Accounting for crypto-assets*. [https://www.ey.com/en\\_gl/ifrs-technical-resources/ifrs-accounting-for-crypto-assets](https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/ifrs-accounting-for-crypto-assets)
- Fadjrih Asyik, N. (2016). Perspektif Agency Theory: Pengaruh Informasi Asimetri Terhadap Manajemen Laba (Menggunakan Pendekatan Agency Framework). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*.  
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2000.v4.i1.1898>
- Global Legal Research Center. (2018). Regulation of Cryptocurrency Around the World. *The Law Library of Congress*, 5080(June).  
<https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/regulation-of-cryptocurrency.pdf>
- IAI, I. A. I. (2019). Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK). *Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia*, 1–78.  
[http://iaiglobal.or.id/v03/files/file\\_berita/DE\\_Kerangka\\_Konseptual\\_Pelaporan\\_Keuangan\\_\(KKPK\).pdf](http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE_Kerangka_Konseptual_Pelaporan_Keuangan_(KKPK).pdf)

- IASB, I. A. S. B. (2018). Conceptual Framework For Financial Reporting. In *Business Accounting* (IFRS Conce). International Accounting Standard Board. [https://doi.org/10.1007/978-1-137-00662-2\\_5](https://doi.org/10.1007/978-1-137-00662-2_5)
- IFRIC. (2019). Holdings of Cryptocurrencies. In *IFRS-Interpretations Committee meeting*. <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2019/june/ifric/ap12-holdings-of-cryptocurrencies.pdf>
- KPMG, I. (2018a). *Defining Issues Template 18-13 Blockchain and digital currencies challenge traditional accounting and reporting models*.
- KPMG, I. (2018b). *Realizing blockchain's potential*.
- Marr, B. (2017). *A Short History Of Bitcoin And Crypto Currency Everyone Should Read*. Forbes. <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/12/06/a-short-history-of-bitcoin-and-crypto-currency-everyone-should-read/?sh=6c4648823f27>
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System | Satoshi Nakamoto Institute. In *2008-10-31*.
- Raiborn, C., & Sivitanides, M. (2015). Accounting Issues Related to Bitcoins. *Journal of Corporate Accounting & Finance*. <https://doi.org/10.1002/jcaf.22016>
- Rooney, K. (2018). *Your guide to cryptocurrency regulations around the world and where they are headed*. CNBC. <https://www.cnbc.com/2018/03/27/a-complete-guide-to-cyprocurrency-regulations-around-the-world.html>
- Sianipar, T. (2017). *Bitcoin dilarang otoritas keuangan Indonesia, ini fakta-faktanya*. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42265038>
- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 6(1), 53–61.
- Yahya, B. A. T. (2016). Mitigasi Risiko Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Cryptocurrency (Studi Kasus Pada Bitcoin). *Journal of Accounting*, 53(9), 1689–1699.
- Yulianton, H., Santi, R. C. N., Hadiono, K., & Mulyani, S. (2018). Implementasi Sederhana Blockchain. *Sintak*, 2(November), 306–309. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sintak/article/view/6635>
- Zubir, A. S., Awi, N. A., Ali, A., Mokhlis, S., & Sulong, F. (2020). Cryptocurrency Technology and Financial Reporting. *International Journal of Management and Humanities*, 4(9), 103–108. <https://doi.org/10.35940/ijmh.i0898.054920>